

APBD Kaltim 2026 Hanya Rp15 Triliun

Sumber: KORAN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Samarinda – DPRD dan Pemprov Kaltim menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Persetujuan bersama itu ditandatangani dalam Rapat Paripurna ke-47 yang digelar di Gedung D DPRD Kaltim, Minggu (30/11) malam. APBD 2026 disetujui sebesar Rp15 triliun, setelah sebelumnya dilakukan penyesuaian dan pemangkasan anggaran yang mencapai Rp6 triliun.

Meski terjadi pengurangan yang signifikan, Pemprov Kaltim memastikan sejumlah program prioritas tetap berjalan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, se usai rapat paripurna menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara menyeluruh pada semua sektor pemerintah provinsi.

“Semua dipangkas, semuanya. Tapi yang jelas TPP seluruh ASN dan PPPK aman,” tegas Rudy. Selain itu, ia memastikan bahwa Program Bantuan Pendidikan atau GratisPol Kaltim tetap berjalan sebagaimana direncanakan. “Program GratisPol juga *insyaAllah* berjalan sesuai harapan. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk Kaltim,” ujarnya. Rudy menjelaskan bahwa pembahasan APBD tahun ini berlangsung lebih panjang.

Hal itu karena pemerintah daerah harus melakukan penyisiran ulang terhadap struktur anggaran. Terutama terkait perhitungan anggaran pendapatan. “Memang karena persoalan berkaitan dengan anggaran pendapatan kita yang dihitung ulang oleh tim anggaran. Kami menyisir ulang hingga akhirnya ketemu di angka Rp15 triliun,” jelasnya.

Di tengah pemangkasan anggaran, Pemprov Kaltim tetap optimistis bahwa pembangunan daerah akan berjalan sesuai arah strategis. Terlebih Kaltim harus menghadapi persiapan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028. “Ikhtiar kita untuk Kaltim ke depan tetap kuat. Yakinlah, *InsyaAllah* kita siap menyambut Ibu Kota Nusantara,” kata Rudy.

Rudy juga menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pada 2026. “Doakan ya, untuk PAD-nya *insyaAllah* lebih kencang lagi ke depan,” ujarnya. Dengan disetujuinya APBD 2026, Pemprov Kaltim kini menunggu proses evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri agar anggaran tersebut dapat ditetapkan secara final. **(ai/sh/cy)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, APBD Kaltim 2026 Hanya Rp15 Triliun, 02/12/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.